

BAB I

PENDAHULUAN

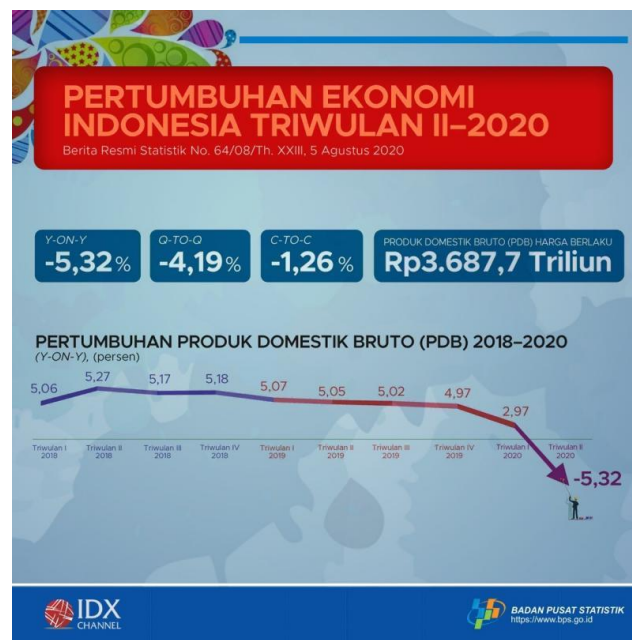
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting serta sebagai salah satu alat tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dimana salah satu tujuan dari pada pembangunan tersebut yaitu untuk dapat terus meningkatkan serta melakukan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, dan membuat pembaruan atau inovasi-inovasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga pertumbuhan dalam bidang ekonomi disini merupakan suatu perkembangan program pada ranah perekonomian yang dapat berdampak pada semakin banyaknya barang ataupun jasa yang dihasilkan masyarakat (Indayani & Hartono, 2020). Kurang lebih dalam kurun waktu dua tahun ini tepatnya pada awal tahun 2020 negara Indonesia tengah dilanda pandemi *corona virus disease 2019* yang lebih dikenal dengan sebutan covid-19. Dimana pandemi covid-19 ini banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pandemi covid-19 sudah membuat perekonomian ini masuk ke dalam kondisi resesi ekonomi. Proses tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi tingkat nasional berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto yang mengalami penurunan atau kontraksi hingga negatif yang dimulai pada saat triwulan II di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai hingga minus 5,3%, hal tersebut dilansir dari www.djkn.kemenkeu.go.id/.

Seperti yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



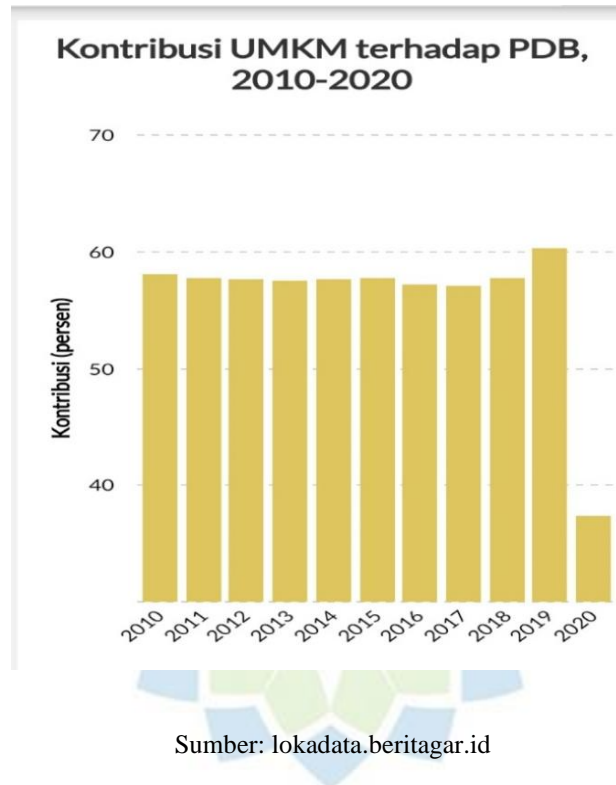
Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diamati bahwasannya pada triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan PDB yang sangat drastis sekali hingga mencapai minus -5,32. Produk Domestik Bruto (PDB) disini dapat diartikan sebagai salah satu alat yang sering digunakan dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara, atau didenisikan sebagai total pengeluaran serta pendapatan nasional atas output jasa atau pun barang. Produk domestik bruto ini dapat dijadikan sebagai bentuk ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Dimana dalam angka PDB dapat merangkum berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu negara pada periode tertentu dalam satuan mata uang (Sayifullah & Emmalian, 2018).

Dalam proses penanganan covid-19, pemerintah telah melakukan beragam upaya, di antaranya dengan adanya pembatasan dalam memasuki Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PPKM dan lain sebagainya. Adanya batasan ruang gerak terhadap masyarakat pada masa pandemi covid-19, tentulah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin menurun, daya beli masyarakat yang turun, bertambahnya jumlah pengangguran dan kemiskinan dalam suatu daerah serta banyaknya aktivitas sektor usaha yang terhenti yaitu termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pada awalnya UMKM menjadi salah satu sektor pendukung serta memiliki peranan penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Nasional di Indonesia cukup besar, penyerapan tenaga kerja yang ada pada UMKM juga terhitung cukup banyak dengan demikian dapat menjadi upaya dalam mengurangi beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi seperti pengurangan jumlah pengangguran yang ada, pengurangan angka kemiskinan, dan lain sebagainya. Tetapi pada masa pandemi covid-19 menjadi pemicu terhadap beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya kontribusi UMKM terhadap PDB yang mengalami penurunan cukup signifikan (Azizah, et al., 2020). Sebagaimana yang dapat dilihat pada diagram tabel berikut ini:

Gambar 1.2

Diagram Batang Kontribusi UMKM Terhadap PDB



Berdasarkan gambar 1.2 dapat diamati bahwasannya kontribusi UMKM terhadap PDB mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2010-2019 kontribusi UMKM terhadap PDB ini konsisten pada kisaran 55-60 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga dibawah 40 persen, yakni sekitar 37,3 persen. Kontribusi tersebut mengalami penurunan kurang lebih 38,14 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini merupakan tahun pertama masuknya covid-19 ke Indonesia. Pandemi covid-19 ini berdampak cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM sehingga tercatat kurang lebih sebanyak 47% UMKM yang terdampak sehingga mereka harus gulung tikar

berdasarkan hasil survey yang dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM (Nurjanah, 2021).

Melihat kontribusi UMKM yang besar terhadap PDB serta meninjau dampak dari covid-19 terhadap UMKM yang menyebabkan penurunan kontribusi tersebut, maka salah satu penanganan dalam menangani covid-19 ini yaitu melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembangunan nasional memfokuskan pada pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM. Hal mengenai pemberdayaan UMKM ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karenanya memberdayakan dan menumbuh kembangkan UMKM sebagai salah satu objek yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terutama pada masa pandemi covid-19 (Azhary, 2018). Maka dalam mengatasi masalah perekonomian sebagai dampak dari covid-19 ini, sektor pemerintah baik itu pemerintah yang berada di pusat maupun pemerintah daerah harus saling bekerjasama. Menindak lanjuti keputusan Kementerian Koperasi dan UKM, melalui Dinas Koperasi dan UKM masing-masing daerah semakin menggalakkan program pemberdayaan bagi para pelaku UMKM yang ada pada daerahnya masing-masing untuk memulihkan perekonomian masyarakat. (Ma & Wihastuti, 2008). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung menjadi salah satu Dinas yang sudah menjalankan program pemberdayaan UMKM. Hal tersebut merujuk pada peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 yang

mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bentuk tindak lanjut daripada peraturan pemerintah pusat yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 18 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan bagi UMKM Kota Bandung. Pentingnya pemberdayaan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan Kota Bandung dan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota, hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Dimana salah satu tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 yaitu untuk dapat meningkatkan peranan dari UMKM ini dalam proses pembangunan daerah, lapangan kerja, terjadinya pemerataan dalam pendapatan, pertumbuhan dibidang ekonomi, dan pengentasan/mengeluarkan masyarakat dari permasalahan kemiskinan. Dikarenakan UMKM ini dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong pembangunan nasional serta perekonomian maka diperlukannya pemberdayaan sektor UMKM yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Namun seperti banyaknya permasalahan yang terjadi pada masa pandemi covid-19, hal itupun menjadi pemicu tidak maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari media JabarEkspres.com pada tanggal 24 Maret 2021 bahwasanya Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM di Dinas KUKM Kota Bandung, beliau memaparkan hambatan yang dirasakan oleh pihaknya selama masa pandemi yang sudah berlangsung pada satu tahun terakhir ini. Berikut pemaparannya:

“Minimnya modal menjadi permasalahan umum para pelaku usaha mikro. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien juga menjadi salah satu kendala usaha mikro sulit untuk berkembang. Kurangnya inovasi produk, belum memaksimalkan pemasaran secara online, tidak memiliki ijin, itu salah satu penyebab anjloknya omset terutama di masa pandemi saat ini” ungkapannya kepada Jabar Ekspres. (Nizar, 2021)

Maka berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, dikarenakan adanya dampak dari covid-19 yang terjadi dapat terlihat bahwasanya salah satu tujuan program pemberdayaan UMKM yaitu dapat meningkatkan omset para pelaku usaha terhambat karena adanya pandemi sehingga omset para pelaku UMKM sempat mengalami penurunan pada saat tahun pertama terjadinya covid-19. Berikut penjelasan lanjutan dari Ibu Nuri selaku kepala seksi pemberdayaan pada Dinas KUKM Kota Bandung dalam JabarEkspres.com. menurutnya:

“Rata-rata mengalami penurunan omset sebesar 65% dari omset sebelum terdampak. UMKM Jenis kuliner seperti makanan ringan kemasan, dan minuman ringan mengalami penurunan bervariasi antara 60% sampai 97%. Namun khusus untuk produk madu dan obat-obatan tradisional mengalami kenaikan 100%.” Ungkapnya.

“Hal serupa juga menimpa jenis UMKM fashion yang mengalami penurunan hingga 79%. Jenis usaha fashion paling terdampak adalah UMKM yang bergerak di bidang pakaian. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan order, bahan baku yang susah didapat dan harga yang mahal serta terhambatnya distribusi menggunakan jasa

pengiriman. Meski demikian lanjutnya, khusus untuk produksi konveksi yang mengalihkan sementara produksinya ke pembuatan masker kain mengalami kenaikan omset lebih dari 100%. UMKM yang bergerak dibidang craft secara umum mengalami penurunan omset rata-rata sebesar 84%. Hal ini terjadi karena berkurangnya permintaan pasar. UMKM yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan dan lainnya mengalami penurunan sebesar 73%.” Jelasnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat terlihat bahwasannya pada tahun pertama terjadinya covid-19 ini, program pemberdayaan UMKM ini belum dapat tercapai dengan efektif dikarenakan adanya dampak yang dirasakan dari covid-19. Oleh karenanya peran dari pemerintah Kota Bandung salah satunya Dinas KUKM untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan ini sangat dibutuhkan agar dapat mencapai sasaran serta tujuan-tujuan dari program pemberdayaan secara optimal sehingga dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami dampak dari covid-19. Berdasarkan pemaparan tersebut pula dapat dilihat bahwasannya masalah yang didapat oleh para UMKM pada masa pandemi covid-19 diantaranya adalah minimnya modal yang dimiliki, akses pemasaran offline yang terbatas, kurangnya inovasi produk yang dipasarkan, belum optimalnya akses pasar online, dan permasalahan lainnya.

Selain itu kendala yang dihadapi pada masa pandemi covid-19 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung ini terdapat pada anggaran biaya yang digunakan. Dalam pelaksanaan suatu program tentulah membutuhkan anggaran biaya sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang terselenggaranya suatu program yang dilaksanakan. Begitupun

dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM ini tentulah membutuhkan anggaran biaya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program tersebut. Berikut merupakan pagu dan realisasi anggaran sesuai PK Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2020:

Tabel 1.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1 dan 2

No	Sasaran	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi yang Berdaya Saing	1.904.689.266	1.679.616.750	88,18
2	Meningkatkan Kinerja UMKM yang Berdaya Saing	1.085.156.663	1.033.667.084	95,26
	Jumlah	2.989.845.929	2.713.283.834	90,75

Sumber: LAKIP Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dikaji bahwasannya dalam penggunaan pagu serta realisasi anggaran pada tahun 2020 ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari pagu serta realisasi anggaran yang belum mencapai 100 persen. Dimana untuk sasaran strategis 1 realisasi anggarannya baru mencapai 88,18 persen dan untuk sasaran strategis 2 yang salah satu programnya yaitu pemberdayaan UMKM realisasi anggarannya baru mencapai 95,26 persen. Sehingga total keseluruhan realisasi anggarannya baru mencapai 90,75 persen. Sedangkan penggunaan anggaran biaya ini menurut (Makmur, 2015) dapat dikatakan efektif apabila dalam penggunaannya tidak mengalami kurang atau lebih anggaran pembiayaan hingga kegiatan atau program tersebut dapat

terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 ini belum dikatakan efektif karena anggaran yang belum mencapai 100% dalam realisasinya.

Berdasarkan beragam permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana efektivitas program pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung serta ingin mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala para pelaksana program dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap **“Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat daripada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka ditemukan identifikasi masalah antara lain:

1. Adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis dikarenakan adanya pandemi covid-19.
3. Terjadinya penurunan kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020.

4. Adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM serta pemerintah pada masa pandemi covid-19.
5. Realisasi anggaran sasaran 2 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung yang belum mencapai 100%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan penentuan waktu pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
2. Bagaimana ketepatan perhitungan biaya pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
3. Bagaimana ketepatan dalam pengukuran keberhasilan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
4. Bagaimana ketepatan dalam menentukan pilihan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
5. Bagaimana ketepatan berfikir dalam program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
6. Bagaimana ketepatan dalam melakukan perintah program

pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?

7. Bagaimana ketepatan dalam menentukan tujuan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
8. Bagaimana ketepatan sasaran program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Ketepatan penentuan waktu pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
2. Ketepatan perhitungan biaya pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
3. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?

5. Ketepatan berfikir dalam program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
6. Ketepatan dalam melakukan perintah program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?
8. Ketepatan sasaran program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung?

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap khazanah keilmuan serta pemahaman yang lebih banyak mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM dan dapat memperkaya hasil penelitian mengenai UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur dalam mengkaji berbagai gejala ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat secara ilmiah. Adapun untuk hasil temuan ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang UMKM.

1.6 Kerangka Pemikiran

Program pemberdayaan UMKM menjadi satu program kerja bidang usaha mikro yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Dimana pemberdayaan UMKM ini merupakan suatu langkah yang cukup strategis dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan dan memperkokoh dasar kehidupan dalam perekonomian dari sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia, yang diharapkan dapat membuka penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi kesenjangan, serta dapat mengurangi kemiskinan. Maka dari itu, efektif atau tidaknya program pemberdayaan UMKM ini dapat menjadi tolak ukur bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung sendiri selaku pelaksana dari pada program pemberdayaan ini untuk menentukan langkah selanjutnya dalam memperbaiki, mempertahankan serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM selanjutnya. Menurut Makmur (2017: 6) suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila ketika pelaksanaannya terdapat kesesuaian antara harapan dan hasil yang terwujud. Oleh karenanya efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Dimana memang dikatakan efektif itu jika suatu hasil yang diperoleh telah tepat sasaran ataupun visi yang sudah ditetapkan sebelum suatu pekerjaan dilakukan.

Oleh karenanya, untuk mengukur apakah program tersebut sudah

dapat dikatakan efektif atau tidaknya dapat diukur berdasarkan beberapa dimensi menurut Makmur (2017: 7) yaitu: Ketepatan penentuan waktu, Ketetapan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berfikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan sasaran.

Sehingga berdasarkan beberapa dimensi tersebut peneliti dapat melihat bagaimana efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam meningkatkan perekonomian di Kota Bandung. Kemudian dari pada itu, diharapkan program pemberdayaan UMKM yang ditetapkan dapat berjalan optimal. Selain itu dari ke empat variabel tersebut dapat diketahui apasaja faktor yang dapat mendorong serta menghambat dari setiap kegiatan yang dijalankan. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema kerangka berpikir yang menjadi landasan berfikir dalam penelitian ini.

Skema Kerangka Pemikiran

Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM



Dimensi Efektivitas Menurut Makmur (2015: 7):

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berpikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran



Tercapainya Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19